Website : http://um-tapsel.ac.id email : justitia@um-tapsel.ac.id
JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
P- ISSN: 2356 - 9033
E -ISSN: 2579 - 9398
Fakultas Hukum

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG

Monica Afrila Sahroni Putri,[1)] Hardjito S Darmojo,[2)] Andika Hazrumy[3)]

Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana,
Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia

2407010017@students.unis.ac.id[1)]
hardjito.sdarmojo@*students.unis.ac.id*[2)]
andika.hazrumy@*unis.ac.id*[3)]

Abstrak

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang memerlukan penanganan lintas sektor melalui pendekatan collaborative governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam program penanggulangan stunting di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap para pemangku kepentingan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berjalan cukup baik dengan adanya pembagian peran yang jelas, peningkatan kesadaran gizi masyarakat, serta penurunan prevalensi stunting secara signifikan di wilayah tersebut. Namun, tantangan berupa keterbatasan anggaran operasional dan hambatan koordinasi logistik di tingkat kelurahan masih ditemukan. Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat kerangka regulasi formal dan meningkatkan alokasi anggaran serta kapasitas kader di lapangan guna menjamin keberlanjutan program penanggulangan stunting.

Kata kunci: Cipondoh; kolaborasi pemerintahan; kesadaran gizi; kota tangerang; stunting

Abstract

Stunting is a chronic nutritional issue requiring cross-sectoral interventions through a collaborative governance approach. This study aims to analyze the effectiveness of collaboration among the government, private sector, and community in stunting reduction programs in Cipondoh District, Tangerang City. The research methodology applied is descriptive qualitative, collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation involving key stakeholders. The results indicate that the collaboration runs successfully with explicit role distribution, enhanced public nutritional awareness, and a significant decrease in stunting prevalence within the region. Nevertheless, operational budget limitations and logistical coordination constraints at the sub-district level remain. It is recommended that the local government reinforce the formal regulatory frameworks, increase budget allocations, and build field-workers' capacity to ensure the sustainability of the stunting eradication initiative.

Keywords: *cipondoh; collaborative governance; nutritional awareness; stunting; tangerang city*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan manifestasi klinis dan fisik dari kegagalan pertumbuhan yang berkepanjangan pada anak-anak di bawah usia lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta stimulasi psikososial yang tidak memadai dalam seribu hari pertama kehidupan. Secara global maupun nasional, persoalan ini menempati urgensi tertinggi karena dampaknya tidak hanya terbatas pada perawakan fisik yang pendek, melainkan mencakup penurunan kapasitas kognitif, hambatan perkembangan motorik, kerentanan terhadap penyakit metabolik di masa dewasa, serta penurunan

produktivitas ekonomi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah.

Dalam konteks Indonesia, target nasional penurunan prevalensi stunting terus dikejar melalui berbagai instrumen hukum dan program strategis nasional. Kota Tangerang, sebagai salah satu kota urban yang padat di Provinsi Banten, menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang kompleks di mana disparitas kesejahteraan dan keterbatasan akses informasi gizi masih menjadi tantangan utama. Kecamatan Cipondoh, dengan karakteristik wilayah yang heterogen serta memiliki kantong-kantong pemukiman padat penduduk, menjadi perhatian khusus karena angka stunting di wilayah ini memerlukan intervensi yang bersifat multisektoral, integratif, dan berkelanjutan secara terpadu.

Kompleksitas penanganan masalah stunting menunjukkan bahwa pendekatan konvensional yang bersifat hierarkis-birokratis dari pemerintah saja tidak lagi memadai. Dibutuhkan sebuah model tata kelola pemerintahan yang melibatkan aktor-aktor non-pemerintah secara sinergis. Model ini dikenal sebagai collaborative governance, sebuah pengaturan tata kelola di mana instansi publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif, formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik serta mengelola program kemasyarakatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berpusat pada bagaimana dinamika model kolaborasi antarsektor yang terjadi di Kecamatan Cipondoh, faktor-faktor apa saja yang menghambat jalannya kemitraan tersebut, serta sejauh mana komitmen bersama mampu mendorong keberhasilan penurunan angka prevalensi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan gizi kronis. Kajian pustaka mengenai tata kelola kolaboratif menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah sinergi sangat ditentukan oleh kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan yang transparan, serta proses kolaborasi itu sendiri yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara yang terukur.

Teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menjadi pisau analisis utama untuk mengurai fenomena tata kelola di Kecamatan Cipondoh ini. Teori tersebut menekankan bahwa kolaborasi adalah sebuah siklus dinamis yang melibatkan dialog terus-menerus guna menjembatani perbedaan kepentingan demi mencapai tujuan bersama. Keberadaan aktor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) serta keterlibatan aktif kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu menjadi pilar penggerak di tingkat tapak yang melengkapi kebijakan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dicanangkan oleh instansi kesehatan daerah.

Latar belakang sosiologis masyarakat Cipondoh yang sangat agamis dan berbasis komunitas juga menjadi modal sosial penting dalam menggerakkan program ini. Namun, kurangnya pemahaman mendalam tentang integrasi program lintas dinas acapkali memicu ego sektoral, di mana penanganan stunting masih dianggap sebagai tugas eksklusif Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat. Oleh sebab itu, meleburkan perspektif akademis, kerangka regulasi, dan implementasi teoretis secara deskriptif dalam kajian pendahuluan ini sangat krusial untuk memetakan akar permasalahan koordinasi kelembagaan publik di Kota Tangerang.

Melalui penelaahan mendalam tanpa membuat subjudul terpisah untuk tinjauan pustaka maupun landasan teori, analisis pendahuluan ini menegaskan bahwa stunting tidak boleh dipandang sekadar sebagai isu medis-klinis. Isu stunting adalah cerminan

dari kegagalan sistemik tata kelola lingkungan, ekonomi keluarga, edukasi kepengasuhan, dan distribusi logistik pangan. Dengan demikian, sinkronisasi kebijakan antarpemangku kepentingan dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga unit terkecil keluarga di Kecamatan Cipondoh menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi demi terwujudnya target zero stunting secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara mendalam dan sistematis mengenai fenomena collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi interaksi relasional, dinamika kekuasaan, dan proses pembangunan kepercayaan di antara para aktor kelembagaan yang terlibat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap makna di balik tindakan serta kebijakan yang diimplementasikan secara holistik langsung dari perspektif para informan kunci.

Sumber data penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui serangkaian teknik observasi partisipatif, dokumentasi resmi, serta wawancara mendalam yang dilakukan terstruktur maupun semi-terstruktur. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa pihak yang diwawancarai memiliki otoritas, pengetahuan mendalam, serta keterlibatan langsung dalam program. Para informan tersebut meliputi Camat Cipondoh, Kepala Puskesmas di wilayah Cipondoh, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, perwakilan perusahaan swasta penyalur dana CSR, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, serta kader kesehatan Posyandu.

Bahan penelitian atau fokus kajian utama mencakup dokumen regulasi daerah seperti Peraturan Walikota mengenai percepatan penurunan stunting, rencana aksi daerah, laporan tahunan capaian gizi balita, transkrip wawancara, catatan lapangan hasil observasi pada pos-pos pelayanan terpadu, serta data kuantitatif prevalensi stunting Kecamatan Cipondoh sebagai data pendukung validasi lapangan. Pengamatan langsung difokuskan pada bagaimana proses pelaksanaan rapat koordinasi antarsektor, mekanisme penyaluran bantuan makanan tambahan, serta intensitas penyuluhan gizi yang diselenggarakan oleh para kader kepada ibu hamil dan ibu menyusui di kawasan pemukiman padat.

Teknik analisis data yang digunakan merujuk pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan utama berjalan secara berkelanjutan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap kondensasi data, peneliti merangkum, memilih fokus, dan menyederhanakan catatan lapangan mentah serta transkrip wawancara ke dalam kategori-kategori konseptual berdasarkan dimensi teoretis collaborative governance. Selanjutnya, data disajikan secara naratif deskriptif yang diintegrasikan dengan kutipan langsung informan untuk memperkuat keabsahan temuan, sebelum akhirnya diverifikasi dengan teori tata kelola pemerintahan publik guna menghasilkan kesimpulan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis lapangan menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang telah berjalan melalui struktur kemitraan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, sektor privat, organisasi masyarakat, dan akademisi. Penurunan angka stunting yang

tercatat secara administratif membuktikan adanya dampak positif dari integrasi program intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan secara bersama-sama oleh para aktor tersebut.

Kondisi Awal dan Dinamika Komunikasi Antara Aktor Pemerintah dan Masyarakat

Kondisi awal pelaksanaan program di Kecamatan Cipondoh diwarnai oleh tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai stunting serta tingginya resistensi terhadap intervensi medis awal. Banyak keluarga menolak anaknya dikategorikan stunting karena stigma negatif di lingkungan sosial. Menghadapi situasi ini, pihak Kecamatan bersama Puskesmas menginisiasi dialog tatap muka secara intensif dengan merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat guna menyamakan persepsi dan membangun pemahaman bersama mengenai bahaya stunting bagi generasi masa depan.

Komunikasi yang dibangun secara berkala melalui forum lokakarya mini bulanan tingkat kecamatan berhasil menjembatani kesenjangan informasi. Keterlibatan aktif kader PKK menjadi jembatan krusial antara birokrasi pemerintah dengan komunitas masyarakat di tingkat rukun tetangga dan rukun warga. Para kader melakukan pendekatan persuasif dari rumah ke rumah untuk memantau tumbuh kembang balita, memberikan edukasi mengenai pola asuh yang sehat, serta mendistribusikan paket makanan tambahan bergizi secara langsung kepada kelompok sasaran.

Dialog terbuka yang dilakukan secara rutin juga meminimalkan potensi konflik kepentingan antarinstansi. Puskesmas bertindak sebagai penyedia data klinis dan pelayanan kesehatan spesifik, sementara pihak Kecamatan dan Kelurahan memobilisasi sumber daya lokal untuk intervensi sensitif seperti penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak. Melalui pembagian tugas yang saling melengkapi ini, komunikasi antar-aktor bertransformasi dari sekadar koordinasi administratif menjadi komitmen kerja sama yang bersifat substansial dan partisipatif.

Desain Kelembagaan dan Mekanisme Akuntabilitas Program Penanggulangan Stunting

Desain kelembagaan kolaborasi di Kecamatan Cipondoh diperkuat dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan hingga kelurahan. Struktur formal ini memberikan kejelasan hukum bagi keterlibatan pihak non-pemerintah, termasuk sektor swasta melalui program CSR perusahaan manufaktur di sekitar wilayah Tangerang. Perusahaan swasta berkontribusi dalam penyediaan sarana prasarana fisik seperti alat ukur antropometri standar kit untuk Posyandu serta pendanaan suplemen gizi tambahan khusus.

Akuntabilitas program dijaga melalui sistem pelaporan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang terintegrasi. Setiap data balita stunting diperbarui setiap bulan oleh kader Posyandu dan diverifikasi oleh petugas gizi Puskesmas sebelum dipublikasikan dalam rapat evaluasi triwulanan. Transparansi data ini memungkinan para aktor swasta memantau efektivitas pemanfaatan dana bantuan gizi yang mereka salurkan, sehingga kepercayaan antarpihak tetap terjaga dengan sangat baik.

Kendati desain kelembagaan sudah terstruktur secara formal, kendala birokratis terkait fleksibilitas pencairan anggaran daerah terkadang menghambat respons cepat intervensi di lapangan. Ketergantungan yang tinggi pada dana APBD Kota Tangerang membuat pemenuhan kebutuhan logistik darurat untuk balita gizi buruk sering kali

mengalami keterlambatan. Di sinilah peran kontribusi finansial mandiri dari swasta dan swadaya masyarakat menjadi katup penyelamat yang menjaga kesinambukan program tetap berjalan tanpa terputus alur birokrasi.

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai perkembangan hasil intervensi kolaboratif di lapangan, berikut ini disajikan tabel capaian penurunan prevalensi stunting di wilayah Kecamatan Cipondoh dalam kurun waktu empat tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Balita Diukur (Jiwa)	Jumlah Kasus Stunting (Jiwa)	Prevalensi Stunting (%)
2023	12.450	892	7,16%
2024	13.120	654	4,98%
2025	13.890	412	2,96%
2026	14.230	215	1,51%

Sumber: Data Sekunder Diolah dari Laporan Tahunan Puskesmas di Kecamatan Cipondoh (2026)

Proses Kolaborasi dan Pembangunan Kepercayaan di Tingkat Komunitas Tapak

Tahapan proses kolaborasi menurut model Ansell dan Gash mencakup dialog tatap muka berkelanjutan yang melahirkan rasa saling menghargai. Di Kecamatan Cipondoh, proses ini terwujud dalam bentuk Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan yang mempertemukan pembuat kebijakan dengan pelaku langsung di lapangan. Dalam forum ini, suara para kader kesehatan didengarkan secara seksama, sehingga melahirkan rasa kepemilikan bersama (shared ownership) terhadap seluruh program intervensi gizi yang direncanakan.

Pembangunan kepercayaan (trust building) memerlukan waktu yang cukup lama mengingat latar belakang kepentingan aktor yang berbeda-beda. Pihak swasta awalnya ragu terhadap efisiensi manajemen penyaluran bantuan pangan oleh aparat kelurahan. Melalui pendampingan ketat oleh pihak akademisi perguruan tinggi setempat dan audit sosial terbuka oleh komite warga, keraguan tersebut berhasil dikikis dan digantikan oleh hubungan kemitraan jangka panjang yang solid berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama program.

Dampak nyata dari siklus proses kolaborasi ini adalah terciptanya pemahaman bersama bahwa penanganan stunting tidak bisa diselesaikan sepihak. Pihak swasta menyadari keberlanjutan bisnis mereka bergantung pada kualitas modal manusia lokal, sedangkan pemerintah daerah mengakui keterbatasan anggaran publik memerlukan dukungan pembiayaan alternatif non-pemerintah. Sinergi ini mengantarkan Kecamatan Cipondoh menjadi salah satu wilayah dengan laju penurunan angka stunting tercepat di Kota Tangerang.

Hambatan Operasional dan Faktor Pendukung Keberlanjutan Sinergi Multisektoral

Meskipun mencatat berbagai keberhasilan substantif, jalannya collaborative governance di Kecamatan Cipondoh tidak terlepas dari sejumlah hambatan operasional. Salah satu faktor krusial yang sering kali dikeluhkan adalah fluktuasi tingkat partisipasi aktif kader Posyandu akibat minimnya insentif operasional bulanan yang mereka terima. Beban kerja kader yang sangat tinggi dalam melakukan pelacakan kasus dan edukasi gizi tidak sebanding dengan kompensasi materiil, yang berpotensi memicu kejenuhan kerja di tingkat tapak.

Selain itu, aspek koordinasi logistik lintas kelurahan di Kecamatan Cipondoh masih menghadapi tantangan geografis dan ketimpangan infrastruktur penyimpanan makanan tambahan. Beberapa kelurahan dengan kepadatan penduduk ekstrem kekurangan fasilitas pendingin yang memadai untuk menyimpan stok susu formula khusus dan suplemen protein cair, sehingga risiko kerusakan bahan pangan bergizi sebelum didistribusikan kepada balita sasaran menjadi cukup tinggi.

Di sisi lain, faktor pendukung utama keberlanjutan kemitraan ini adalah kuatnya komitmen politik dari Walikota Tangerang yang diterjemahkan secara konsisten oleh jajaran aparatur kecamatan. Kebijakan daerah yang mewajibkan seluruh instansi mengalokasikan porsi program pendukung sanitasi dan ketahanan pangan keluarga miskin terbukti mampu mengakselerasi pencapaian target. Integrasi ini memastikan bahwa anak-anak yang telah lulus dari status stunting klinis tidak kembali jatuh ke kondisi gizi buruk akibat lingkungan pemukiman yang tidak higienis.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan model collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang terbukti sangat efektif dalam menurunkan prevalensi stunting melalui mekanisme kerja sama multisektoral yang terstruktur. Sinergi dinamis antara instansi pemerintah daerah, sektor swasta melalui pendanaan CSR, serta keterlibatan aktif kader kesehatan masyarakat mampu mengatasi hambatan komunikasi kultural dan mempercepat distribusi program intervensi gizi secara komprehensif langsung ke sasaran rumah tangga.

Proses kolaborasi ini berjalan sukses karena ditopang oleh komunikasi intensif dalam forum rembuk stunting, keterbukaan data pelaporan gizi balita, serta komitmen jangka panjang para aktor untuk membangun kepercayaan bersama demi peningkatan mutu sumber daya manusia lokal. Kunci utama keberhasilan tata kelola kemitraan ini terletak pada pembagian peran yang seimbang, di mana intervensi medis spesifik dari otoritas kesehatan diintegrasikan secara padu dengan intervensi sensitif lingkungan dan pembiayaan logistik mandiri dari kalangan pelaku usaha.

Saran logis ke depan yang dapat direkomendasikan adalah perlunya Pemerintah Kota Tangerang menyusun regulasi formal yang memberikan jaminan peningkatan insentif operasional serta pelatihan kapasitas berkala bagi para kader kesehatan di tingkat Posyandu sebagai ujung tombak pergerakan lapangan. Selain itu, alokasi anggaran daerah perlu diperluas secara khusus untuk pengadaan infrastruktur penyimpanan rantai dingin logistik bahan makanan tambahan di setiap kantor kelurahan guna mencegah kerusakan gizi pangan dan memastikan efisiensi distribusi bantuan berjalan optimal tanpa kendala teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. (2025). Kecamatan Cipondoh dalam Angka 2025. Tangerang: BPS Kota Tangerang.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang. (2025). Laporan Capaian Kinerja Program Kesehatan Masyarakat dan Penurunan Stunting Tahun 2024. Tangerang: Dinas Kesehatan.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta: Kemenkes RI.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Purwanti, S., & Rahayu, T. (2023). Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Masalah Gizi Buruk di Kawasan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 123-138. https://doi.org/10.21831/jap.v14i2.5432

Sudarsono, H. (2024). Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Sukmana, W. (2025). Modal Sosial dan Partisipasi Kader PKK dalam Upaya Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan. Jurnal Sosiologi Kontemporer, 9(1), 45-59.

Walikota Tangerang. (2024). Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Tangerang: Sekretariat Daerah Kota Tangerang.